

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman digital saat ini, membuat Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat lainnya terdorong untuk berinovasi dengan kemajuan teknologi digital. Dalam konteks perkembangan saat ini, teknologi informasi menjadi sangat penting. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Ketika teknologi informasi berkembang dengan cepat, ada kesempatan untuk mengembangkan efisiensi dan kinerja sistem pengendalian sumber daya. Perkembangan teknologi informasi ini mendorong sektor pemerintah untuk menerapkan sistem. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penyajian informasi serta memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan terpercaya. Dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja keuangannya kepada masyarakat melalui laporan keuangan, pemerintah harus memberikan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang berkualitas tinggi (Pembayun, 2023). Jika pemerintah memenuhi prinsip *Good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi publik maka pemerintahan dianggap baik, terutama dalam hal pelaporan keuangan akuntansi (Putri & Akbar, 2022).

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai Pembina daerah, mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, hal ini kemudian dipertegas dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan Nomor 903/235/Kedua tahun 2021 bahwa semua pemerintah daerah diamanatkan untuk menggunakan aplikasi SIPD sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 yang menetapkan bahwa wajib satu aplikasi yang digunakan pada sub bagian program dan keuangan. Penerapan aplikasi web ini dimaksudkan untuk mempercepat dan memudahkan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik pemerintah. Selain itu, tujuan penerapan aplikasi berbasis website ini adalah untuk

mengoptimalkan dan mempermudah proses pengendalian serta evaluasi layanan publik, khususnya di Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Namun, pada tahun 2021 menurut evaluasi yang dilakukan Kemendagri, 26% masih belum menggunakan aplikasi SIPD secara menyeluruh (Arif dan Firmansyah, 2024). Meskipun dengan adanya SIPD ini mempermudah pekerjaan Pemerintah Daerah, tetapi terjadi banyak kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan SIPD, sehingga hal tersebut dapat menghambat pekerjaan pemerintah. Menurut Arif dan Firmansyah (2024), ada beberapa kendala yang dirasakan dalam penerapan SIPD, seperti terjadinya kendala teknis, *server down*, kendala jaringan, dan lainnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah dalam penerapan SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan pemerintah daerah, kontrol aplikasi yang lemah, kurangnya integrasi dengan aplikasi pemerintah daerah lainnya, dan tidak tervalidasi keandalannya, yang meningkatkan resiko kegagalan integrasi dan keterpaduan data serta informasi keuangan daerah (BPK RI, 2021).

Pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan SIPD versi terbaru yang bernama SIPD RI yang sudah diuji coba pada tahun anggaran 2023. SIPD RI merupakan perkembangan lanjutan atau generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya dan satu – satunya sistem yang sejauh ini dapat menyatukan semua tingkatan dengan baik. Meskipun uji coba tersebut hanya mencakup proses perencanaan dan penganggaran, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan bahwa Pemerintah Daerah mulai tahun anggaran 2024 harus menggunakan SIPD RI untuk perencanaan dan penganggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Pemerintah daerah akan menggunakan SIPD RI untuk berbagai tujuan, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaporan keuangan.

Dengan peralihan sistem SIPD menjadi SIPD RI, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara gagasan modifikasi pemerintah daerah ke dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan satu data Indonesia. Hal ini mendorong inovasi percepatan elektronisasi untuk seluruh Pemerintah Daerah. Dengan adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan

akuntansi pelaporan, diharapkan dapat memperbaiki kekurangan serta kesalahan dengan sistem sebelumnya. Adanya peralihan sistem tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Edward menyatakan bahwa ada empat variabel yang berpengaruh dalam implementasi sistem informasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan publik merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Selain itu, faktor sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan itu dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*). Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Oleh karena itu, struktur birokrasi akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Transformasi SIPD ke SIPD RI telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Summersari pada tahun 2023. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Summersari Kabupaten Jember pada tahun 2023. Dalam penerapan SIPD RI, Kantor Kecamatan Summersari pada sub bagian perencanaan masih mengalami beberapa hambatan yang kerap kali terjadi. Mengutip dari (<https://indonesiapos.co.id>) sejumlah OPD di Kabupaten Jember mengalami kendala dalam penerapan SIPD RI. Kendala yang dihadapi oleh sejumlah OPD di Kabupaten Jember yaitu lambatnya akses SIPD RI, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran kegiatan. Kendala tersebut juga dirasakan oleh Kantor Kecamatan Summersari. Dengan adanya kendala tersebut juga membuat pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kecamatan Summersari menjadi tidak transparan, karena lambatnya akses SIPD RI dan sistem yang *error*. Kendala yang dirasakan oleh Kantor Kecamatan Summersari tersebut, dikarenakan adanya kendala jaringan yang lambat, sehingga sub bagian perencanaan pada Kantor Kecamatan Summersari tidak dapat mengakses SIPD RI. Jaringan yang digunakan pada Kantor Kecamatan Summersari kurang memadai,

sehingga koneksi internet dalam mengakses SIPD RI sering lambat dan terputus, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah. Selain lambatnya dalam mengakses SIPD RI, Kantor Kecamatan Sumbersari menghadapi tantangan dan kendala terkait kemampuan administratif dalam mengelola keuangan daerah, seiring dengan penerapan kebijakan baru. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dimana kebijakan baru mengenai SIPD RI, dalam proses pelaporan keuangan menjadi lebih mendalam. Penerapan SIPD RI dalam tahap implementasi pada Kantor Kecamatan Sumbersari dengan sistem baru tidaklah sederhana. Dengan hambatan - hambatan ini, diperlukan perhatian dan penyelesaian untuk memastikan bahwa harapan untuk pengendalian keuangan daerah dapat melangkah lebih maksimal.

Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan SIPD RI, juga mengalami hambatan dalam penerapannya. Menurut Nirmala, Irfansyah, dan Zakir (2023) menyatakan bahwa adanya kendala jaringan internet dan kebijakan Pemkab yang belum menggunakan SIPD dalam hal penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan. Selain itu, pada penelitian Sari (2024) menyatakan bahwa implementasi SIPD RI belum efektif, karena terdapat kendala terjadinya eror, jaringan server yang macet atau loading saat digunakan adalah beberapa alasan mengapa penerapannya masih belum efektif.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi penggunaan SIPD RI karena Kantor Kecamatan Sumbesari kerap mendapati sejumlah kelemahan SIPD RI, kendala – kendala tersebut dapat menghambat implementasi SIPD RI sehingga dapat berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penting dilakukan penelitian ini karena mayoritas membahas mengenai SIPD versi lama sedangkan penelitian mengenai SIPD RI masih sedikit dilakukan. Alasan peneliti memilih Kantor Kecamatan sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui bagaimana implementasi SIPD RI pada awal penerapan tahun 2023 hingga saat ini, yang sebelumnya Kantor Kecamatan Sumbersari menggunakan SIPD versi lama. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus objek penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang masih belum

pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya, serta penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai SIPD RI yang penelitiannya masih sedikit dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Pada Kantor Kecamatan Sumbersari di Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) Pada Kantor Kecamatan Sumbersari di Kabupaten Jember?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Pada Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang diterapkan di Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi lain untuk para peneliti lain terkait Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

3. Manfaat Bagi Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi Kantor Kecamatan Sumbersari yang menghasilkan rekomendasi operasional yang dapat diterapkan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia

(SIPD RI), seperti penyusunan template *Standard Operating Procedure* khusus penggunaan SIPD RI tingkat Kecamatan, panduan singkat penanganan eror sistem yang sering muncul serta dokumentasi praktik terbaik atau *best practice* dari pegawai yang sudah berpengalaman sebagai bahan pembelajaran internal.